

EDITORIAL:

**REAKTUALISASI ETIKA, SOSIAL, DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Patricius Neonub

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: patrisn@yahoo.com

Persahabatan merupakan fenomena relasional yang kompleks dan menarik untuk dikaji dari perspektif filosofis etis. Dalam kajian etika, persahabatan dipandang sebagai bentuk hubungan interpersonal yang memiliki nilai moral dan etika. Persahabatan juga dilihat sebagai fenomena sosial yang mengandung unsur normatif, emosional, dan psikologis. Persahabatan sebagai fenomena relasional memiliki nilai moral dan etika yang penting, seperti kejujuran, kepercayaan, empati, dan menghargai keunikan individu. Persahabatan juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral seseorang, serta mendorong seseorang untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam hubungan interpersonal. Persahabatan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks mempertahankan relasionalitas positif dan mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam hubungan sosial.

Manusia adalah makhluk relasional. Setiap manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Membangun relasi merupakan salah satu tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup seseorang. Membangun relasi merupakan etika yang tidak dapat dihindari pada setiap pribadi manusia. Etika merupakan suatu keniscayaan dalam diri manusia karena menampilkan disiplin suatu perbuatan baik. Dalam ziarah kehidupan manusia di dunia ini, kebaikan merupakan sesuatu yang harus selalu dicari. Manusia tidak bisa menjadi penonton kebaikan, karena harus menjadi pelaku yang selalu memperjuangkan apa yang disebut kebenaran universal. Dengan demikian, membangun hubungan dalam etika persahabatan adalah sesuatu yang harus selalu dicari, dikejar, dicapai dan dilatih pada setiap pribadi manusia di dunia ini.

Ricoeur mendefinisikan etika politik sebagai "hidup bersama dengan baik dengan dan untuk orang lain dalam institusi yang adil". Artinya kehidupan yang baik tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri tetapi juga diarahkan kepada orang lain. Lainnya merujuk pada orang-orang yang terpinggirkan secara sosial, budaya dan politik. Misalnya dalam konteks budaya adalah rasisme atau diskriminasi terhadap orang Papua. Mereka sering disebut sebagai bangsa monyet. Istilah monyet dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap identitasnya sebagai manusia. Mereka tersingkir dari DPR RI yang bernaung di bawah Pancasila. Yang lain juga muncul pada isu mayoritas dan minoritas, khususnya terkait agama. Posisi pihak lain sebagai objek menunjukkan dekadensi etika moral dalam kehidupan politik praktis di Indonesia. Menurut Ricoeur diri dan orang lain harus berada dalam hubungan yang simetris untuk mencapai kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

Bagi Aristoteles etika adalah tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan, jadi perilaku yang baik dan memiliki nilai moral adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang mendamaikan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Aristoteles, perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan secara rasional dan disertai kebajikan. Manusia pada dasarnya menginginkan kebahagiaan yang mendamaikan dirinya dan lingkungannya. Dengan memahami nilai-nilai etika Aristoteles, masyarakat Indonesia bisa memperoleh kebahagiaan yang

mendamaikan diri dan lingkungannya dengan menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga tercapai keinginan manusia yang hakiki yaitu perdamaian.

Sementara itu, kontestasi politik elektoral menjadi tempat berkembang biaknya isu-isu primordial. Mayoritas ingin dipimpin oleh seorang pemimpin yang beragama mayoritas. Isu agama dan suku digunakan untuk memenangkan kontes politik. Narasi pribumi dan pagan bergema dan mengarah pada perpecahan. Etika tanggung jawab levinian mengungkapkan gagasan untuk menempatkan orang lain sebagai subjek yang unik dan berbeda sama sekali melalui wajah mereka yang terlihat. Konsekuensinya adalah pihak lain harus dihormati dan dihargai sebagai subyek. Sekaligus kehadiran orang lain menjadi tanggung jawab “aku”, tidak menyerap orang lain untuk disamakan dengan diriku atau bahkan ditaklukkan atau dikuasai. Pemahaman politik kita tereduksi hanya pada pemahaman kontestasi politik elektoral saja. Politik kehilangan maknanya sebagai bentuk hidup bersama untuk mencapai kebaikan bersama (*Bonum Commune*). Pasal tersebut mengusulkan agar pendidikan Indonesia memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan multikultural lebih ditekankan di sekolah agar persoalan primordial tidak berkembang pesat, dan generasi mendatang dapat menerima realitas plural Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari Orang Dawan di pulau Timor memiliki ungkapan kearifan “*meup onle ate, tah onle usif*”, sebuah filsafat budaya. Ungkapan kearifan atau filosofi ini erat kaitannya dengan etos kerja. Etos kerja orang Dawan semakin hari semakin menurun karena berbagai alasan. Etos kerja pada dasarnya merupakan suatu karakter dalam dunia kerja. Etos kerja yang tinggi sangat dibutuhkan dalam hidup manusia universal. Tak bisa dipungkiri bahwa etos kerja yang tinggi menjadi tuntutan bagi siapa pun dan di mana pun seseorang bekerja. Etos kerja dan bekerja memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Adanya kerja mengharuskan adanya etos kerja. Sebagai suatu karakter, etos kerja melekat dalam diri manusia yang hidup dalam dunia atau kebudayaan tertentu. Demikian etos kerja juga memiliki kaitan dengan budaya. Falsafah “*meup onle ate, tah onle usif*” dengan sumbangan konsep bekerja menurut Karl Marx menjadi senjata yang dapat menghancurkan masalah-masalah itu dan demikian dapat meningkatkan etos kerja masyarakat Dawan. Pembaharuan falsafah dengan konsep bekerja menurut Karl Marx membuat falsafah tersebut menemukan esensi yang lebih aplikatif dan dengan demikian semakin tajam dalam menghadapi kultur dunia yang dikuasai dengan kapitalis dan budaya instan.

Dari etos kerja tersebut timbul faktor – faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi ireguler yang dilakukan oleh para Pekerja Migran dari pulau Timor. Buruh berketerampilan rendah dari masyarakat tidak melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan. Permintaan tenaga kerja yang sangat besar di industri ini baik dari dalam maupun luar negeri, di sisi lain, merupakan pendorong utama orang bermigrasi untuk bekerja sebagai buruh migran. Regulasi di semua tingkatan, dari nasional hingga daerah, memfasilitasi liberalisasi pengiriman TKI ke luar negeri. Perekrut melihat ini sebagai peluang untuk mempekerjakan dan mengirim pekerja secara tidak teratur. Calon buruh migran dan keluarganya tidak menyadari bahwa bekerja secara tidak tetap sebagai buruh migran membahayakan keselamatan dan hak-hak mereka sebagai buruh migran. Meskipun beberapa pekerja migran ilegal mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh majikan mereka, hak-hak mereka sebagai pekerja migran tidak ditegakkan oleh majikan mereka, bahkan ada yang kehilangan nyawa sebagai akibatnya.

Dalam konteks Indonesia, etika terkandung tidak hanya dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam *social decorum* berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya. Di tengah perubahan sosial-budaya begitu cepat yang membuat tergerusnya nilai-nilai tersebut, perlu

pemberdayaan dan revitalisasi nilai budaya yang kondusif dan suportif bagi penguatan etika politik dan integritas para penyelenggara negara.

Jelas, dalam masyarakat kita sebenarnya terdapat banyak nilai budaya—yang sering tumpang-tindih dan berpadu dengan nilai dan ajaran agama—seperti etos kerja yang tinggi untuk menjalankan tugas sebaik mungkin; disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas; jujur dalam pelaksanaan tugas; amanah dalam memegang setiap tanggung jawab; bertanggung jawab (akuntabel) dalam tugas; adil dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah; malu melakukan kesalahan; dan patuh pada tatanan hukum, ketentuan, dan ketertiban.

Nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan dan penguatan etika politik dan integritas para pejabat publik sayangnya belum ‘membudaya’ dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Aktualisasi etika, nilai budaya, dan agama yang suportif bagi etika politik dan integritas pejabat publik memerlukan berbagai dukungan. Aktualisasi nilai itu selain memerlukan sosialisasi dan pembudayaan terus-menerus, juga meniscayakan dukungan penegakan hukum konsisten, yang memiliki kekuatan memaksa sehingga berbagai nilai tersebut benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara-bangsa.